

DAFTAR ISI

	hlm
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Spesifikasi Penelitian	10
2. Metode Pendekatan	11
3. Tahap Penelitian.....	11
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Alat Pengumpul Data	14

6. Analisis Data	14
7. Lokasi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	19
A. Perkembangan Teori Negara Hukum.....	19
B. Sistem Pemerintahan Indonesia	24
C. Hubungan Presiden dan DPR	30
BAB III KEDUDUKAN PUTUSAN MK NO. 76/PUU-XII/2014	37
A. Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Pemanggilan Dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana sebelum Putusan MK No.76/PUU- XII/2014.....	37
B. Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Pemanggilan Dan Pemeriksaan Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana setelah Putusan MK No.76/PUU- XII/2014.....	40
C. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi	42
1. Wewenang Mahkamah Konstitusi	42
2. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU- XII/2014	45

BAB IV ANALISIS HUBUNGAN PRESIDEN DAN DPR DALAM PEMERIAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.76/UU-XII/2014	50
A. Mekanisme pemeriksaan Anggota DPR Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XII/2014	50
B. Perwujudan <i>check and balances</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XII/2014	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	xv